

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktek dan Peradilan Sesat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- & Irdan Dahlan. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. cet.7. Jakarta: PT. Bina Aksara. 2004.
- *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2013
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.
- Aziz Syamsudin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grfafika. 2014.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Baharuddin Lopa. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara. 1997.
- Chaerudin. dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Darwan Prinst. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan. 1989.
- Departemen Kehakiman R.I. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*. cet.Kedua. Jakarta. 1982.

- Eddy O.S. Hiearej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Elwi Danil. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2012.
- E. Utrecht dan M. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Cet. Kesebelas*. Jakarta: Penerbit & Balai Buku Ichtar. 1989.
- Ermansjah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Gurnal Myrdal. *Asia Drama Volume II*. Patheon. New York. 1968.
- Hadari Djenawi Tahir. 1982. *Bab tentang Hezienia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Helbert Edelherz. *The Investigation of White Collar Crime. A Manual for Law Enforcement Agencies*. Us Department of Justice. Office of Regional Operation. Law Enforcement Assistance Administration. 1977.
- Jaka Mulyata. "Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/P Undang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2015.
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- K. Wantjik Saleh. *Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1980.
- Leden Marpaung. *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

- , *Proses Penanganan Perkara Pidana. Edisi Kedua*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Mangasa Sidabutar. *Hak Terdakwa. Terpidana. Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2001.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia. 2003.
- Marwan Effendy. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Referensi. Jakarta. 2012.
- , 2013. *Korupsi & Strategi Nasional (Pencegahan Serta Pemberantasannya)*. Referensi (GP Press Group). Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjerlasan Resmi dan Komentar. Cet ke-3*. Bogor: Politeia. 1990.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela, dan Laurensius Rambe Manalu. *Hukum Acara Pidana dari segi pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka mandiri. 2010.
- Parman Soeparman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. cet.1. (Bandung: Refika Aditama. 2007).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2011.

- R. Atang Ranoemihardja. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pen. Tarsito. 2000.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta: 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Shinta Agustina. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Book. 2015.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi & Teknik Korupsi. Mengetahui Untuk Mencegah*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999).
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2006.
- dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana: Arti dan Makna*. cet. 7. Jakarta: Akademika Pressindo. 2006.
- Tolib Effendi. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press. 2014.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan Kedua Belas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

### C. Website

Siti Maryam. *Pengertian Tindak Pidana Korupsi.*



<http://sitimaryamnia.com/2012/02/pengertian-tindak-pidana-korupsi.html> diakses terakhir tanggal 13 November 2019 pukul 19.30 wib

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532aa1eea4606/pertegas-kualifikasi-novum-untuk-pengajuan-pk/> diakses terakhir tanggal 15 April 2019. Pukul 17.00.

Gunawan Widjaja. "Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum". Law Review. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VI. No 1 Juli 2006. (online).

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller.%20Pembuatan%20UndangUndang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>

Ebta Setiawan. ,arti atau makna pembuktian`dalam [http://KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti-atau-makna-pembuktian). diakses pada 14 April 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>. diakses terakhir tanggal 13 April 2019. Pukul 12.27 Wib.

